

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI LAHAN DAN  
KONSERVASI TANAH (RLKT) DI SUB DAS KEDUANG, KABUPATEN  
WONOGIRI, JAWA TENGAH**  
*(Community Participation in Land Rehabilitation and Soil  
Conservation in Keduang Sub Watershed, Wonogiri Regency,  
Central Java)*

Nur Ainun Jariyah

Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Jl. A. Yani PO Box 295 Pabelan,  
Surakarta, Indonesia; e-mail: Nurainun\_2513@yahoo.co.id

Diterima 19 Februari 2014, direvisi 20 Mei 2014, disetujui 7 Juli 2014

**ABSTRACT**

*Keduang Sub Watershed is one of major contributors of sedimentation in Gajah Mungkur reservoir. Since soil conservation projects usually involve a number of small-scale farmers, the success of the projects is likely determined by farmers' participation in all phases of the projects. This study aimed to examine the community participation in land rehabilitation and soil conservation in Ngadipiro village. This research was conducted in Dungwot sub watershed, Ngadipiro village, Nguntoronadi district, Wonogiri regency in Central Java. Data was collected by survei method, using face to face interviews and focused group discussions, which involved the owners of farmlands designated as demonstration plots, community leaders, and farmer group leaders. Data analysis was done by descriptive statistics. The results are as follows: the level of education affects the absorption of information and participation. High pressure on land, as indicated by livelihoods dominated by agriculture and land use dominated by agricultural land. Participation in the Ngadipiro village can be categorised by participation for material incentives. In the ladder of participation, Ngadipiro village falls into the consultation stage.*

*Keywords: Participation, land rehabilitation, soil conservation.*

**ABSTRAK**

Sub DAS Keduang merupakan salah satu penyumbang sedimentasi di waduk Gajah Mungkur. Untuk keberhasilan pembangunan hutan diperlukan partisipasi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Desa Ngadipiro. Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Dungwot tepatnya di Dusun Dungwot dan Dusun Tawing, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok. Responden adalah petani pemilik plot, tokoh masyarakat, ketua kelompok tani. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian adalah: tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyerapan informasi dan partisipasi. Tekanan terhadap lahan tinggi, diindikasikan dari mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh sektor pertanian dan penggunaan lahan didominasi lahan pertanian. Partisipasi di Desa Ngadipiro masuk dalam kategori partisipasi insentif (*participation for material incentive*). Dalam tangga partisipasi, Desa Ngadipiro masuk dalam tangga konsultasi (*consultation*).

Kata kunci: Partisipasi, rehabilitasi lahan, konservasi tanah.

## **I. PENDAHULUAN**

Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Keduang merupakan salah satu penyumbang sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan karakteristik biofisik, seperti jenis tanah. Sebagian besar tanah di Sub DAS Keduang termasuk Oxisol yang bersifat labil sehingga rentan tererosi. Sub DAS Keduang didominasi tegalan seluas 61.131 ha (33,54%) (Harjadi *et al.*,

2000) dan kurang lebih 85% wilayahnya didominasi oleh lahan berlereng agak curam sampai sangat curam, dalam rentang 16% sampai dengan lebih dari 45%. Lahan dengan derajat ketererangan tersebut sangat rentan terhadap bahaya longsor dan erosi (Putra, 2010).

Salah satu dampak dari erosi tanah adalah sedimentasi yang terjadi pada lahan-lahan yang berada pada kawasan hilir atau tengah suatu DAS. Sedimentasi dapat dikendalikan dengan

menggunakan teknologi konservasi tanah, baik dengan penerapan teknologi sipil teknis atau konservasi tanah secara vegetatif. Konservasi tanah vegetatif dilakukan dengan pembangunan hutan tanaman. Manfaat lain dari konservasi adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kuantitas dan kualitas air. Usaha tani konservasi pada dasarnya merupakan suatu paket teknologi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, serta melestarikan sumberdaya tanah dan air pada DAS kritis (Saragih, 1993).

Usaha tani konservasi yang dilakukan di lahan hutan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan, sementara untuk keberhasilan pembangunan hutan diperlukan partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat di sini merupakan partisipasi aktif, baik dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi dalam suatu kegiatan atau program pembangunan (Awang, 1994). Simon (1999) menyebutkan partisipasi adalah kemampuan sistem pengelolaan sumber daya hutan nasional untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah sangat diperlukan untuk daerah yang rentan terhadap erosi, karena akan berdampak sangat luas terhadap daerah di sekitarnya. Keberhasilan pembangunan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah tergantung kepada petani sebagai pelaku utama konservasi, dan pihak lain seperti penyuluh, atau instansi yang terkait adalah sebagai fasilitator. Makalah ini menyoroti proses partisipasi yang telah dilakukan petani dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) di Dusun Dungwot dan Dusun Tawing, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoro-nadi, Kabupaten Wonogiri. Proses partisipasi yang telah dilakukan di Desa Ngadipiro diharapkan dapat diambil manfaatnya untuk kasus-kasus partisipasi di daerah lain.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Kerangka Teori

Proses partisipasi ditinjau dari: 1) identifikasi

masalah; 2) perencanaan; 3) pelaksanaan; 4) monitoring dan evaluasi. Tahap selanjutnya adalah melihat tingkatan dan partisipasi masyarakat. Tingkatan yang digunakan adalah menurut Hobley (1996), yang dibagi menjadi tujuh tingkat, yaitu:

1. Partisipasi Manipulatif (*Manipulative Participation*), adalah partisipasi dengan model keterwakilan pada suatu organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan tidak berbasis pada partisipasi individu.
2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*), adalah partisipasi tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat perihal apa yang telah diputuskan dan dilakukan. Masyarakat langsung menerima keputusan dan dianggap terlibat dalam pembuatan keputusan tersebut.
3. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*), adalah partisipasi melalui tanya jawab di mana melalui diskusi tersebut diharapkan akan dihasilkan identifikasi permasalahan dan aspirasi dari masyarakat. Pendefinisian permasalahan dan pengumpulan informasi dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya atau Pemerintah.
4. Partisipasi untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*), adalah partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Petani dapat menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.
5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*), adalah partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya.
6. Partisipasi Interaktif (*Interactive Participation*), adalah partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan metodologi multidisiplin dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, sehingga

kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.

7. Partisipasi Inisiatif (*Self-Mobilisation*), adalah partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, dan juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

Selain partisipasi berdasarkan Hobley (1996) penelitian juga melakukan penilaian partisipasi menurut Arnstein (1969). Penelitian menggunakan dua penilaian partisipasi tersebut, untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkatan partisipasi di daerah penelitian, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik.

Menurut Arnstein (1969) partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tipologi tangga partisipasi yaitu:

1. Manipulasi (*Manipulation*)  
Pada tangga partisipasi ini dapat diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog.
2. Terapi (*Therapy*)  
Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.
3. Informasi (*Information*)  
Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*).
4. Konsultasi (*Consultation*)  
Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih ber-sifat partisipasi

yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

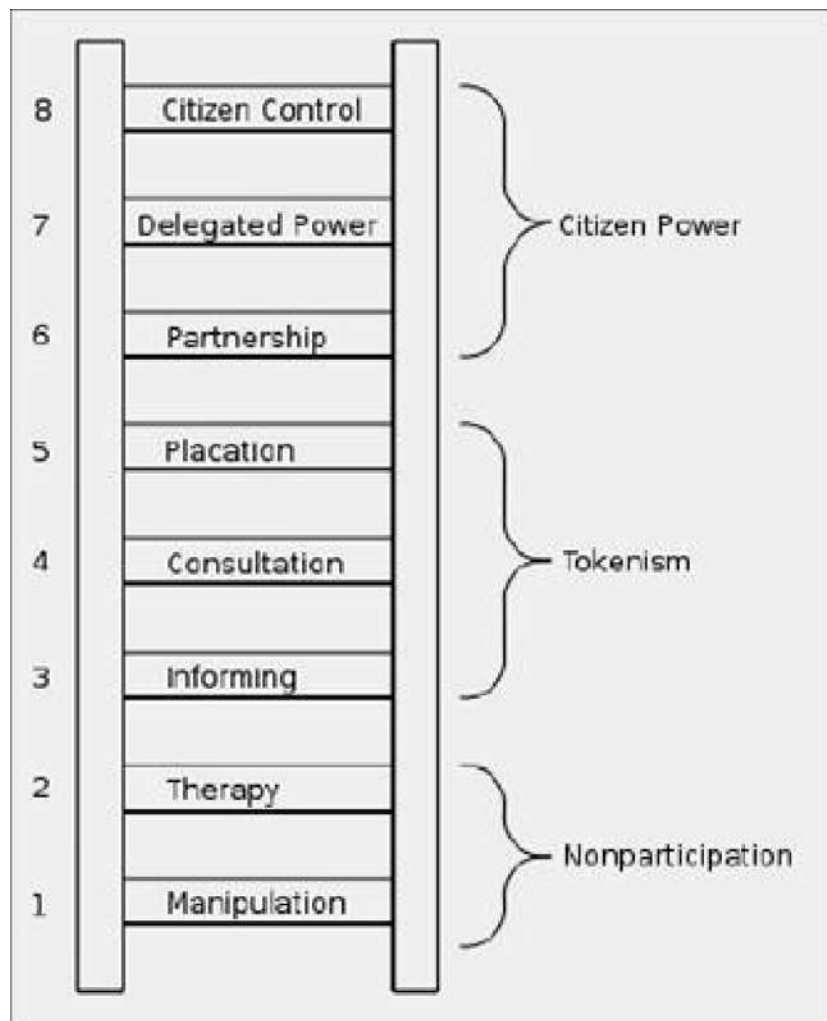
5. Perdamaian (*Conciliation*)  
Pada *level* ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan, namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.
6. Kemitraan (*Partnership*)  
Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
7. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)  
Pada tangga ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.
8. Pengendalian Warga (*Citizen Control*)  
Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah. Secara lebih jelas tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Tabel 1. Derajat, jenis, dan tingkat partisipasi dalam bidang studi pembangunan.

Table 1. Degree, type and level of participation in the field of development studies.

Tangga partisipasi ( <i>Ladder of participation</i> ) (Arnstein, 1969)	Tipe partisipasi ( <i>Type of participation</i> ) (Hobley, 1969)
1. Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	1. Partisipasi manipulasi ( <i>Manipulation participation</i> )
2. Terapi ( <i>Therapy</i> )	2. Partisipasi pasif ( <i>Passive participation</i> )
3. Informasi ( <i>Information</i> )	3. Partisipasi melalui konsultasi ( <i>Participation by consultation</i> )
4. Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	4. Partisipasi untuk insentif ( <i>Participation for material incentives</i> )
5. Perdamaian ( <i>Conciliation</i> )	5. Partisipasi fungsional ( <i>Functional participation</i> )
6. Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	6. Partisipasi interaktif ( <i>Interactive participation</i> )
7. Pendelegasian kekuasaan ( <i>Delegated power</i> )	7. Partipasi inisiatif ( <i>Self mobilization</i> )
8. Pengendalian warga ( <i>Citizen control</i> )	

Sumber (*Sources*): Inoue (2003)



Gambar 1. Tangga partisipasi menurut Arnstein (1969).  
*Figure 1. Ladder of participation by Arnstein (1969).*

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Sub DAS Dungwot tepatnya di Dusun Dungwot dan Dusun Tawing, Desa Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Penelitian berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Sub DAS Dungwot merupakan salah satu anak Sungai Keduang yang merupakan sub DAS penyumbang sedimen terbesar pada Waduk Serbaguna Gajah Mungkur.

## C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Survei dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Sebagai responden adalah anggota kelompok tani

demplot berjumlah 33 orang, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar demplot. Data primer juga dikumpulkan melalui diskusi kelompok (*Focused Group Discussion/FGD*). Data sekunder diperoleh dari pemerintah desa, Dinas Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri.

## D. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RLKT ditinjau dari: 1) identifikasi masalah; 2) perencanaan; 3) pelaksanaan; 4) monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara, survei dan data sekunder yang diambil selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori Hobley (1969) dan Arnstein (1969).

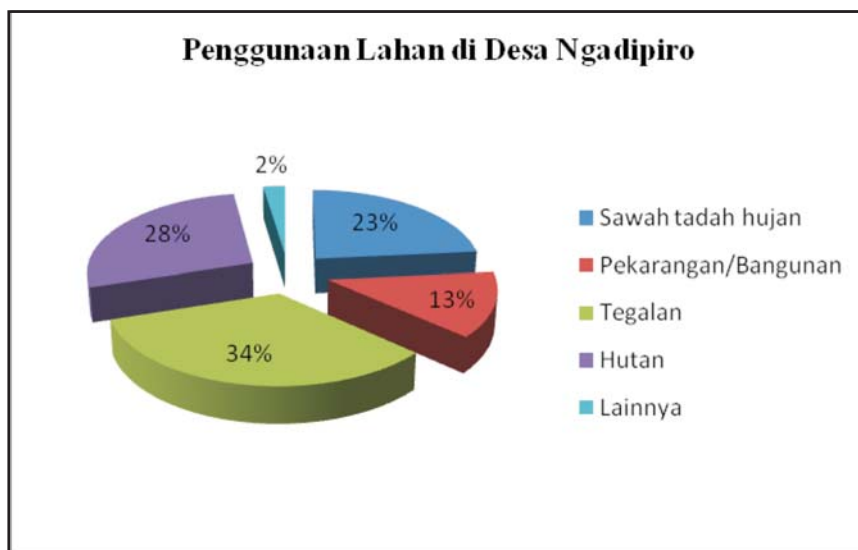
### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Luas wilayah Desa Ngadipiro adalah 561 ha dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.279 jiwa, jumlah penduduk perempuan 1.302 jiwa dan kepadatan penduduknya adalah 460 orang/km. Secara umum kondisi penggunaan lahan di Desa Ngadipiro didominasi tegalan atau lahan kering (33%), diikuti oleh hutan (28%) dan sawah tadah hujan (23%), diikuti oleh hutan (28%) dan sawah tadah hujan (23%). Pekarangan atau bangunan menempati 13% wilayah desa.

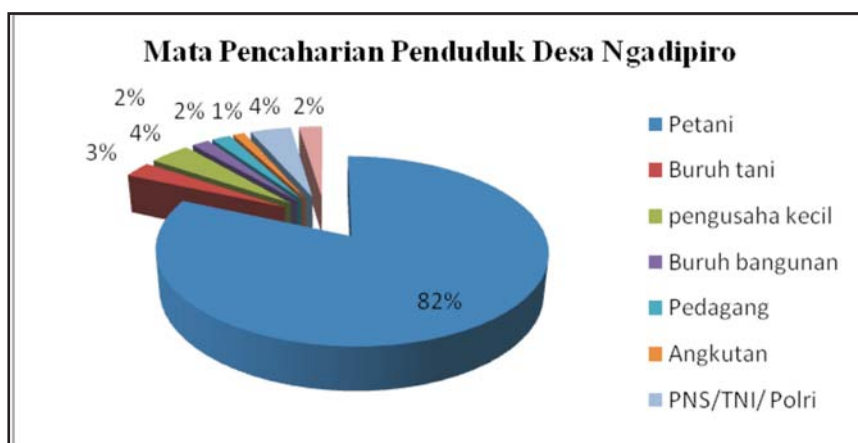
Perincian penggunaan lahan di Desa Ngadipiro disajikan pada Gambar 2. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani (82%), hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai buruh tani (3%). Gambaran rinci mata pencaharian penduduk desa dan produksi usaha tani di Desa Ngadipiro disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 2, 3 dan 4 mengindikasikan tingginya eksploitasi lahan di mana lahan didominasi lahan pertanian, dengan mata pencaharian didominasi petani. Dengan demikian sangatlah wajar jika sub-DAS Dungwot memberikan sumbangan erosi dan



Sumber (Source): BPS (2008)

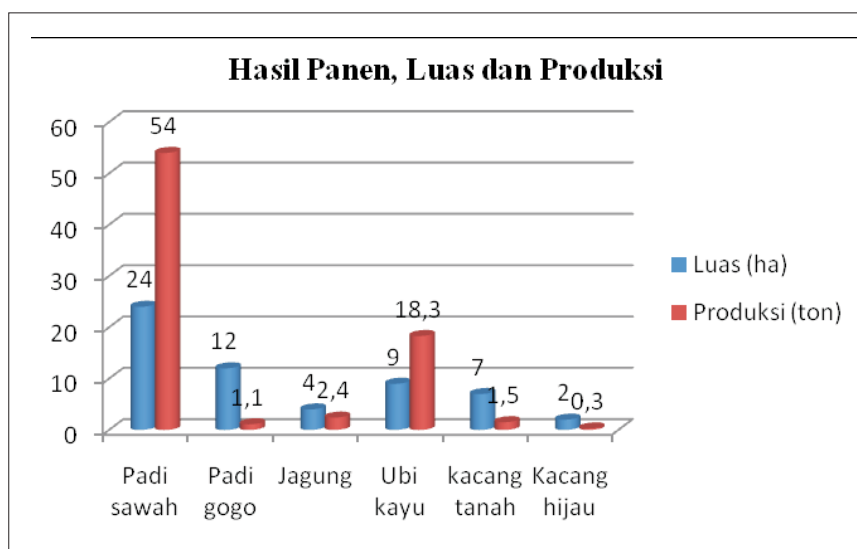
Gambar 2. Penggunaan lahan di Desa Ngadipiro.  
Figure 2. Land use in Ngadipiro village.



Sumber (Source): BPS (2008).

Gambar 3. Mata pencaharian penduduk di Desa Ngadipiro.  
Figure 3. Residents livelihood in Ngadipiro village.

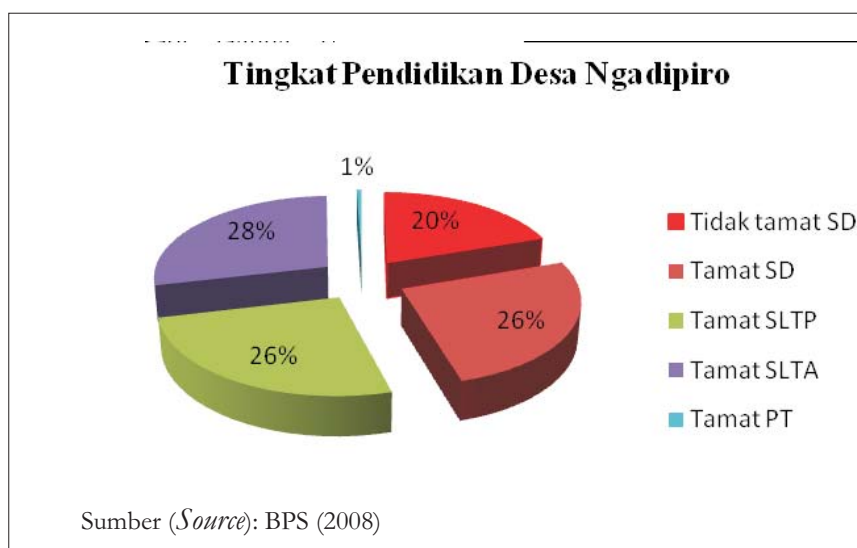




Sumber (Source): BPS (2008)

Gambar 4. Hasil panen, luas dan produksinya.

Figure 4. Crops, area and production.



Sumber (Source): BPS (2008)

Sumber (Source): BPS (2008)

Gambar 5. Tingkat pendidikan di Desa Ngadipiro.

Figure 5. Level of education in Ngadipiro village.

sedimentasi tanah yang tinggi pada sub-DAS Keduang, hal ini juga di dukung oleh hasil penelitian dari Maro'ah (2011).

Pendidikan penduduk Desa Ngadipiro adalah dari sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) kurang lebih hampir sama, yaitu sekitar 26-28%, tetapi masih ada penduduk yang tidak tamat SD sebesar 20%. Secara lebih jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Ngadipiro dapat dilihat pada Gambar 5.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dalam memandang masa depan yang lebih baik, dalam berperilaku dan dalam menyerap informasi (Lesmana *et al.*, 2011). Menurut Soekartawi (1988), mereka yang berpendidikan tinggi akan lebih cepat dalam sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah agak sulit untuk menerima teknologi dengan cepat. Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa kesadaran penduduk untuk bersekolah masih kurang, hal tersebut dilihat

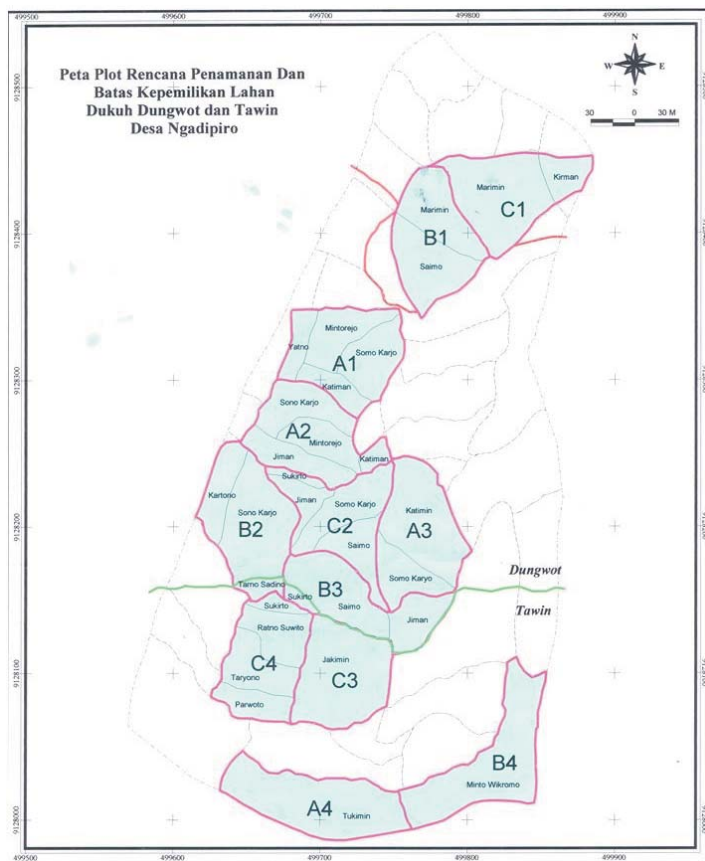
dari masih tingginya penduduk tidak tamat SD (20%). Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, walaupun hal itu tidak menjamin bahwa pendidikan tinggi mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjalankan konservasi tanah dan air.

## B. Anggota Kelompok Tani Plot Demonstrasi (Demplot)

Anggota kelompok tani yang terlibat dalam demplot penanaman dan demplot konservasi tanah adalah petani dari anggota Kelompok Tani Ngesti Mulyo. Kelompok tani tersebut berdiri sejak tahun 1982 dengan anggota 33 orang. Pada saat penelitian dilakukan, jumlah anggota kelompok tani bertambah menjadi 84 orang dan sebagai ketuanya adalah Sutino. Kegiatan Kelompok Tani Ngesti Mulyo antara lain: 1) bidang pertanian yaitu pengolahan lahan, pembuatan teras dan talud, penyewaan pompa air untuk pengairan dan pem-

bagian bantuan benih; 2) bidang kehutanan yaitu penanaman pohon penghijauan; 3) bidang lainnya yaitu simpan pinjam, arisan dan pengumpulan iuran (Badan Litbang Kehutanan, 2007).

Plot demonstrasi dilakukan di lahan milik (0,85 ha) yang terdiri dari empat orang dan di hutan negara (4,24 ha) yang terdiri dari 29 orang. Lahan milik petani dikelola oleh pemiliknya sendiri, sedangkan lahan milik Perhutani dikelola oleh masyarakat (pesanggem) yang berkedudukan sebagai mitra yang berasal dari Dusun Dungwot dan Dusun Tawing. Perbedaan kepemilikan lahan akan mempengaruhi cara pengolahan lahan. Pada umumnya dengan status lahan milik, pengolahan lahannya akan lebih intensif dan lebih bertanggungjawab, tetapi pada status lahan milik Perhutani, petani kurang perhatian dan tidak mempunyai rasa memiliki. Hal ini karena lahan Perhutani kurang subur dan lebih banyak tanah berbatu. Peta plot penanaman petani demplot dapat dilihat pada Gambar 6.



### Keterangan (Remarks):

Model (Model)	Konservasi tanah (Land conservation)
A. jati + mangga + mete	Gulud + rumput
B. Jati + mangga + petai	Gulud + lamtoro
C. Jati + mangga + mete + petai	Gulud

Gambar 6. Peta plot penanaman dan batas kepemilikan lahan di Desa Ngadipiro.  
Figure 6. Planting plot maps and land boundaries in the Ngadipiro village.

## C. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan RLKT

### 1. Identifikasi Masalah

Desa Ngadipiro pada awalnya adalah desa yang subur dan makmur. Kondisi hutannya menghidupkan semua. Ketika pada tahun 1997-1998, saat proses reformasi di mana masyarakat menganggap hutan adalah milik rakyat, maka banyak hutan negara yang dijarah oleh masyarakat. Pada awalnya masyarakat tidak ada kemauan untuk menjarah hutan, tetapi karena pemberitaan di televisi dilakukan dengan gencar, masyarakat tidak mau ketinggalan, sehingga masyarakatpun ikut melakukan penjarahan di hutan. Kayu hasil rampasan dari hutan sebagian digunakan untuk keperluan sendiri dan ada yang dijual. Dampak yang paling terasa setelah kejadian tersebut adalah menurunnya jumlah mata air. Pada awalnya jumlah mata air ada tujuh buah, tetapi sekarang tinggal satu atau dua mata air. Kondisi sumur yang ada pada saat musim kemarau menjadi kering kerontang. Sebelum hutan menjadi gundul, air selalu tersedia sepanjang tahun. Belum lagi ancaman bahaya tanah longsor yang bisa terjadi setiap saat. Kondisi tanah bukit yang cenderung gembur dengan sudut kemiringan 30-40° mengakibatkan kondisi lahan menjadi kritis.

Pada tahun 2007 Kelompok Tani Ngesti Mulyo bersama instansi terkait Balai Penelitian Pengelolaan Kehutanan Daerah Aliran Sungai Solo (BPTKPDAS Solo), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman (P3HT) di Bogor dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (PPLH UNS) mulai bahu-membahu melakukan penghijauan di bukit Kendeng. Bukit Kendeng merupakan lahan Perhutani, tetapi masyarakat tetap mau melakukan kegiatan penghijauan tersebut melihat dampak yang telah mereka rasakan seperti mulai menurunnya jumlah mata air, kondisi hutan yang mulai gundul dan ancaman longsor yang tidak tahu kapan datangnya. Dengan adanya kegiatan tersebut lambat laun kesadaran masyarakatpun mulai meningkat betapa pentingnya menjaga lingkungan. Sekarang ini kondisi Desa Ngadipiro sudah mulai menghidupkan kembali, walaupun kondisi hutan belum seperti dulu. Kondisi lingkungan sudah mulai berubah dengan tumbuhnya mata air baru, meskipun secara ekonomi belum memberikan hasil yang nyata.

### 2. Perencanaan

Melihat keadaan Desa Ngadipiro dalam kondisi kritis, maka BPTKPDAS Solo, P3HT di Bogor dan PPLH UNS melakukan kerjasama dalam kegiatan percobaan dengan menanam tanaman keras seperti jati, mangga, jambu mete dan pete, dan juga dilakukan penanaman tanaman penguat teras seperti rumput gajah dan lamtoro. Sementara itu kegiatan pengembangan dilakukan pada tahun 2009 dengan pembuatan plot erosi untuk pengamatan erosi dan banjir dan dilakukan pemeliharaan teras bangku yang sudah ada di lokasi.

Ide awal dan perencanaan dilakukan oleh ketiga instansi tersebut. Pada saat penentuan jenis tanaman, terlebih dahulu masyarakat dikumpulkan untuk sosialisasi kegiatan tersebut. Jenis tanaman yang ditanam berdasarkan kesesuaian lahan dan kemauan petani. Setelah petani setuju, maka dilakukan penanaman di lahan masing-masing petani yang ditunjuk sebagai petani demplot. Petani demplot adalah petani yang bersedia sebagai peserta demplot, di mana lahannya ditanami tanaman yang disesuaikan dengan proyek kerjasama tersebut. Petani tidak boleh melakukan penanaman selain tanaman yang disediakan oleh BPTKPDAS Solo. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan petani dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan mempunyai rasa memiliki karena jenis tanaman merupakan usulan dan keinginan dari petani sendiri. BPTKPDAS Solo mendesain pengaturan jarak tanam, menyediakan bibit, pupuk dan pengaturan pemberian jumlah pupuk. Tanaman yang dipilih adalah jati, mangga, jambu mete, pete, rumput gajah dan lamtoro. Beberapa jenis tanaman tersebut merupakan tanaman yang biasa ditanam di Desa Ngadipiro seperti jati dan jambu mete, sementara tanaman lainnya merupakan tanaman yang jarang ditanam di Desa Ngadipiro, tetapi petani ingin membudidayakan karena sesuai dengan lahan mereka. Penanaman dilakukan di lahan milik dan sebagian di lahan Negara (lahan Perhutani). Penanaman di lahan Perhutani dilakukan oleh pesanggem.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan penanaman dilakukan berdasarkan instruksi dari BPTKPDAS Solo yaitu dengan mengatur jarak tanam antara tanaman kayu, tanaman perkebunan dan tanaman penguat teras



yaitu rumput gajah dan lamtoro. Biaya bibit, pupuk dan pemeliharaan berasal dari BPTKPDAS Solo, sedangkan tenaga kerja berasal dari petani. Selain itu juga dilakukan pembuatan saluran pembuangan air (SPA) yang dimaksudkan untuk mengarahkan aliran air yang ada sehingga lebih terarah dan tidak melimpas ke lahan pertanian. Rumput penguat teras juga dibuat untuk menguatkan teras agar tidak rusak bila terkena gerusan air. SPA merupakan hal baru bagi petani di Desa Ngadipiro. Petani antusias menyambut pembuatan SPA. Menurut petani dengan pembuatan SPA tersebut, tanah yang tererosi lebih mudah untuk dikembalikan ke lahan, dan tanah yang hilang dapat dikurangi.

Proses partisipasi di Desa Ngadipiro tersebut baru sebatas penentuan jenis tanaman yang ditanam, dan jika ada tanaman yang mati atau rusak petani melakukan penyulaman sendiri, tetapi hanya untuk jenis tertentu saja yaitu jati. Tanaman jati di Desa Ngadipiro tersedia dalam jumlah banyak sehingga tidak perlu membeli untuk penyulaman. Sementara itu penanaman jenis tanaman lain seperti mangga, pete dan jambu mete petani merasa keberatan karena bibit tersebut diperoleh dengan cara membeli dan menurut mereka mahal harganya. Partisipasi yang dilakukan oleh petani Desa Ngadipiro tersebut merupakan partisipasi tenaga kerja dalam mendukung pelaksanaan program. Diharapkan dari partisipasi ini banyak hal yang dapat diserap seperti rasa kompetisi, rasa tanggung jawab dan solidaritas.

Pemeliharaan teras di demplot khususnya di lahan Perhutani kurang berjalan dengan baik, karena lahan tersebut bukan merupakan lahan milik di mana pesanggem belum mempunyai rasa memiliki. Selain itu, kondisi biofisik lahan mempunyai kelerengan yang sangat curam dan berbatu besar, sehingga apabila pembuatan teras dilakukan maka petani hanya memiliki lahan olah yang sempit sehingga petani tidak bisa menanam tanaman tumpangsari dalam jumlah banyak. Petani merasa apa yang diperoleh tidak sebanding dengan jerih payahnya.

Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah belum banyak dilihat manfaatnya oleh petani. Mereka baru melihat dari satu sisi saja yaitu segi ekonomi (*tangible benefit*) dan belum melihat dari dampak lingkungannya (*intangible benefit*). Dampak ekonomi merupakan dampak yang langsung diterima oleh petani sedangkan dampak lingkungan bersifat

jangka panjang, sehingga jauh dari pemikiran petani. Begitu juga dalam pembuatan SPA, petani merasa kesulitan dalam pembuatannya dan membutuhkan biaya yang banyak. Mengubah pola pikir petani tentang pentingnya RLKT memerlukan waktu lama, tidak dapat dilakukan secara instan. Selain itu diperlukan kesabaran dan keuletan dari pihak terkait untuk dapat menumbuhkan pentingnya kelestarian lingkungan.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi hasil tanaman, dilakukan secara bersama-sama antara petani demplot dan BPTKPDAS Solo, sehingga jika ada hal-hal yang perlu dilakukan tindakan, maka dapat segera dilakukan. Sebagai contoh, jika ada tanaman yang mati seperti jambu mete, petai dan mangga, maka akan segera dilakukan penyulaman. Khusus untuk tanaman jati masyarakat sudah mampu mengganti tanaman tersebut dengan mencari dari lingkungannya sendiri tanpa harus membeli, sedangkan untuk jenis jambu mete, petai dan mangga petani tidak mampu atau belum mau mengeluarkan uang untuk membeli bibit. Jika ada tanah yang longsor, petani mau mengembalikan ke lahan semula agar kesuburan dan ketebalan tanah tidak hilang. Petani mau melakukan hal tersebut karena di beberapa tempat, batu-batu sudah mulai bermunculan, yang mengindikasikan bahwa lapisan tanah sudah semakin tipis.

Secara keseluruhan proses partisipasi di Desa Ngadipiro tergolong partisipasi untuk insentif (*participation for material incentives*), yaitu partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Petani Desa Ngadipiro menyediakan lahan dan tenaga, dan mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut (Hobley, 1996), sedangkan dalam tangga partisipasi, partisipasi masyarakat masuk dalam tangga konsultasi (*consultation*). Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Oleh instansi yang berwenang sudah ada penjangkaran aspirasi, dan telah dibuat aturan pengajuan usulan. Meskipun telah muncul harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan

dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi. Tahap ini masuk dalam tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna (Arnstein, 1969).

Partisipasi akan berhasil apabila: 1) tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan partisipasi; 2) manfaatnya lebih besar; 3) relevan dengan kepentingan; 4) kemampuan yang memadai untuk menangani bidang garapan partisipasi; 5) kemampuan berkomunikasi timbal-balik; 6) tidak timbul perasaan terancam bagi kedua belah pihak dan 7) masih dalam bidang keleluasaan pekerjaan (Davis & Newstroom, 1995). Dari ketujuh prasyarat tersebut yang tidak terdapat di petani Desa Ngadipiro adalah kemampuan berkomunikasi timbal-balik, petani tidak merasa terancam jika tidak melakukan partisipasi tersebut.

Menurut Kartasasmita (1996) beberapa teknik yang dapat diadopsi untuk peningkatan partisipasi masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui: 1) *enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, misalnya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; 2) *empowering* yaitu memperkuat potensi atau daya masyarakat yang dapat dilakukan dengan pemberian kredit, simpan pinjam berbunga rendah, pelatihan pemasaran dan manajemen dan membangun paguyuban-paguyuban atau kelompok usaha bersama dan 3) *protecting* yaitu mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Ketiga hal tersebut dapat diterapkan di Desa Ngadipiro untuk menyukseskan program RLKT seperti pemberian kredit usaha dengan bunga ringan, pelatihan (pertanian, pemasaran, manajemen), dan memberdayakan kelompok usaha bersama yang sudah ada. Hal ini perlu pembinaan dan pendampingan awal dari instansi terkait. Ketika kegiatan sudah berjalan maka masyarakat dapat dilepas dan dapat berusaha sendiri. Pendekatan dalam pembangunan yang selama ini masih berorientasi pada masyarakat (*people oriented*), harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered*) (Korten, 1988 dalam Supriatna, 2000). Artinya partisipasi masyarakat

bukan sebagai pendukung tetapi sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan (Alisyahbana, 2008).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Tingkat pendidikan di Desa Ngadipiro sangat berpengaruh dalam penyerapan informasi, sehingga sangat membantu dalam partisipasi rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Tekanan terhadap lahan pada sub DAS Keduang adalah tinggi, diindikasikan dari mata pencaharian penduduk didominasi sektor pertanian dan penggunaan lahan didominasi lahan pertanian. Partisipasi di Desa Ngadipiro masuk dalam kategori partisipasi insentif (*participation for material incentives*) di mana petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Dalam tangga partisipasi, Desa Ngadipiro masuk dalam tangga konsultasi (*consultation*), di mana komunikasi te-lah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual.

##### B. Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, maka diperlukan kerjasama dan partisipasi petani. Beberapa hal yang dapat diterapkan di Desa Ngadipiro adalah pemberian kredit usaha dengan bunga ringan, pelatihan (pertanian, pemasaran, manajemen), dan memberdayakan kelompok usaha bersama yang sudah ada.

Erosi tanah dapat diminimalkan dengan merubah teknik pengolahan lahan dan jenis tanaman yang ditanam, misalnya dengan menanam lebih banyak tanaman berkayu dibandingkan dengan tanaman semusim. Selain itu, mata pencaharian penduduk perlu dialihkan pada mata pencaharian di luar sektor pertanian seperti kegiatan pembuatan kerajinan dari limbah-limbah yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan dinas terkait yang menangani unit usaha kecil. Pembinaan tersebut membuat petani tidak lagi bergantung pada kegiatan di sektor pertanian saja tetapi di luar sektor pertanian mereka juga bisa berjalan.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana. (2008). Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan. *Buletin Penelitian* 7(2), 537-547.
- Arnstein, S. (1969). A ladder of participation. *Journal of American Institute of Planners* 35, 216-224. Diunduh dari [www.google scholar.com](http://www.google scholar.com). (25 Februari 2014).
- Awang, S.A. (1994). Pengembangan hutan rakyat di Jawa Tengah: Harapan dan tantangan. *Jurnal Hutan Rakyat* 1(1), 1-13.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan. (2007). *Model pengelolaan hutan tanaman terpadu untuk peningkatan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tangkapan air Waduk Serbaguna Wonogiri: studi di sub DAS Keduang, Kecamatan Nguntoronadi*. (Laporan Kerjasama Penelitian). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan & Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- BPS. (2008). *Kecamatan Nguntoronadi dalam angka*. Wonogiri: BPS Wonogiri.
- Davis, K. & Newstroom, J.W. (1995). *Perilaku dalam organisasi*. (Edisi 7). Jakarta: Erlangga.
- Harjadi, B., Wuryanto, A., Basuki, T.M., & Wahyuningrum, N. (2000). *Kajian teknik penginderaan jauh dan SIG untuk evaluasi penutupan lahan daerah aliran sungai* (Laporan Hasil Penelitian). Surakarta: BTPDAS.
- Hobley, M. (1996). *Participatory forestry: The process of change in India and Nepal*. In Rural Development Forestry Study Guide 3. London: Rural Development Forestry Network.
- Inoue, M. (2003). Sustainable forest management through local participation: Procedure and priority perspectives. In M. Inoue & H. Isoaki (eds.), *People and forest: policy and local reality in Southeast Asia, the Russian Far East, and Japan*. Boston, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers.
- Kartasmita, G. (1996). *Power dan empowerment: Sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lesmana, D., Ratina, R., & Jumriani. (2011). Hubungan persepsi dan faktor-faktor sosial ekonomi terhadap keputusan petani mengembangkan pola kemitraan petani plasma mandiri kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *EPP* 8(2), 8-17. Diunduh dari [agribisnisfpumjournal.files.wordpress.com/.../jurnal-vol-8-no-2-jumria...](http://agribisnisfpumjournal.files.wordpress.com/.../jurnal-vol-8-no-2-jumria...) (22 Februari 2013).
- Maro'ah, S. (2011). *Kajian laju infiltrasi dan permeabilitas tanah pada beberapa model tanaman (Studi kasus sub DAS Keduang, Wonogiri)*. (Tesis). Universitas Sebelas Maret, Solo. Diunduh dari <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9351> (25 Februari 2013)
- Putra, P.B. (2010). *Model pengelolaan hutan tanaman terpadu untuk peningkatan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Tangkapan Air Waduk Wonogiri (Studi di sub DAS Keduang, Desa Ngadipiro, Kec. Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri)*. *Aspek penerapan teknik agrosilvikultur dan survei sosial ekonomi*. (Laporan Kegiatan Penelitian). Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Balai Penelitian Kehutanan Solo-Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret.
- Saragih, B. (1993). Pemantapan perangkat kelembagaan sosial ekonomi: suatu upaya penanggulangan kemiskinan di DAS kritis. *Prosiding Kongres 11 dan Seminar Nasional MKTI, Yogyakarta*. Diunduh dari <http://repository.ipb.ac.id> (25 Februari 2013).
- Simon, H. (1999). *Potret kehutanan Indonesia masa kini*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soekartawi. (1988). *Prinsip dasar komunikasi pertanian*. Jakarta: UI Press.
- Supriatna, T. (2000). *Strategi pembangunan dan kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.